

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa. Hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Visi Indonesia Tahun 2014 adalah Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014). Untuk mendukung pencapaian visi Indonesia tersebut maka perlu dilakukan suatu proses perencanaan pembangunan nasional yang terarah, terfokus, seimbang, dan berkelanjutan.

Proses perencanaan pembangunan nasional dilakukan dalam suatu sistem. Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dapat dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Mengacu pada visi tersebut, lembaga pemerintah sebagai salah satu penyelenggara negara yang sangat berpengaruh terhadap jalan suksesnya pembangunan disuatu Negara. Dengan kata lain lembaga pemerintahan menjadi tolak ukur dalam mewujudkan tercapainya proses pembangunan yang telah dicanangkan dan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Contohnya lembaga pemerintah yang bergerak dalam sektor pertanian seperti Dinas Pertanian, Tanaman dan Pangan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, karena lembaga tersebut berkaitan dengan menghasilkan bahan pangan, bahan serat dan bio-energi, serta berbagai komoditas lainnya untuk keperluan masyarakat dan industri. Namun terwujudnya proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak terlepas dari kegiatan suatu lembaga pemerintah dalam melakukan pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki (ditengah keterbatasan yang ada).

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan isu sentral yang paling mengemuka saat ini dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat karena lembaga pemerintah diberikan kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada aspek-aspek pemerintah yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawab publik, suatu lembaga pemerintah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisien dan efektivitas untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005).

Namun di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal saat ini banyak menimbulkan permasalahan dalam penilaian pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Contohnya dengan banyaknya kasus korupsi yang justru dilakukan oleh aparatur negara mulai dari gubernur, bupati, walikota, anggota DPRD, hingga pejabat dinas yang telah mencoreng dari makna desentralisasi dan otonomi daerah itu sendiri yang seharusnya mampu melahirkan pelayanan publik (*public service*) yang baik terhadap masyarakat (Achmad Maulani,2010).

Penyelewengan APBD merupakan salah satu jenis korupsi yang terjadi baik itu mulai dari korupsi pengadaan barang dan jasa, pemborosan dana (*mark up*), pungutan liar dan korupsi mengenai perizinan seperti kasus buol yang dilakukan oleh Bupati AB (Amran Batalipu) yang menggunakan dana untuk pilkada (<http://nasional.kompas.com/read/2012/09/15/21182427/Inilah.Lima.Tipe.Korupsi.di.Indone>) diunduh pada tanggal 7 Juni 2014. Kemudian pada tahun 2010 ditemukan 11 kasus korupsi APBD di daerah. Berikut data Kompas mengenai 11 kasus korupsi pada kegiatan APBD di daerah beserta para pelaku korupsi.

Tabel 1.1

Data Kasus-Kasus Korupsi di Daerah

Tahun	Jenis Korupsi	Jumlah Kasus
2010	APBD	11
	Adipura	1
	Bantuan Sosial/Proyek pengetasan kemiskinan	10
	Pengadaan Buku	2
	Surat Izin Usaha	1
	Pengadaan Barang dan Jasa	2
	Pengadaan/Pembebasan Lahan	5
	Proyek Energi Kelistrikan	2
	Pembangunan Infrastruktur	2
	Penyuapan	7
	Perpajakan	1

Sumber : Kompas (18/01/2011)

Tabel 1.2
Data Pelaku Kasus Korupsi
(Tahun 2010)

Tahun	Pelaku Korupsi	Jumlah Kasus
2010	Kepala/Mantan Kepala Daerah	9
	Pimpinan/Mantan Pimpinan DPRD	4
	Anggota/Mantan Anggota DPRD	6
	Pejabat/Mantan Pejabat Daerah (Kepala Dinas)	14
	Pimpinan BUMD (Direktur)	4
	Pimpinan Universitas	1
	Pimpinan Pengadilan	1
	LSM	3
	Lainnya	4

Sumber : Kompas (18/01/2011)

Data diatas menguatkan bahwa kasus korupsi yang sering terjadi adalah penyalahgunaan APBD dengan 11 kasus pada tahun 2010 dan pelaku kasus korupsi terbanyak terdapat pada Pejabat/Mantan Pejabat Daerah (Kepala Dinas) dengan jumlah kasus sebanyak 14. Hal tersebut dipicu dengan adanya kesempatan (*opportunity*), Dimana pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan pelimpahan kewenangan (kekuasaan) yang semakin luas kepada pemerintah daerah.

Tindakan Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat Daerah melainkan tingkat Provinsi pun tidak luput dari tindakan korupsi. Seperti yang tertera pada data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2012 berikut :

Tabel 1.3

**10 Provinsi dengan Laporan Dugaan Korupsi Tertinggi yang dilaporkan ke
KPK
(Tahun 2012)**

No	Propinsi	Jumlah Laporan
1	DKI Jakarta	10.738
2	Jawa Timur	5.655
3	Sumatera Utara	5.207
4	Jawa Barat	4.725
5	Jawa Tengah	3.814
6	Sumatera Selatan	2.706
7	Riau	1.787
8	Sulawesi selatan	1.780
9	Kalimantan Timur	1.742
10	Jambi	1.293

Sumber: KPK 2012 (total laporan yang masuk ke KPK = 57.964)

Pada tabel diatas terdapat 10 provinsi yang melakukan korupsi dengan dugaan korupsi tertinggi. Bahkan provinsi Riau yang menghasilkan banyak sumber daya alam menimbulkan aspek kerugian negara, karena Provinsi Riau adalah Provinsi terkorup dengan salah satu kasusnya korupsi disektor kehutanan

yang merugikan keuangan negara hingga Rp 1,2 Triliun. Pada umumnya bentuk korupsi lain yang terjadi di provinsi Riau seperti pemborosan dana (*markup*), penggelapan dan laporan fiktif atas penggunaan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota. Anggaran yang dikorup terendah tingkatan Kabupaten Kota senilaiRp 200 juta (Dumai) hingga tertinggiRp 142 Miliar (RokanHilir). Pelakunya mulai dari Gubernur, Bupati, Kepala Dinas hingga kontraktor.

Dengan banyaknya permasalahan tersebut pengelolaan penerimaan terhadap pengeluaran di lembaga pemerintah baik tingkat daerah maupun tingkat provinsi pada kegiatan APBD harus lebih ditekankan dan diperhatikan agar dapat menunjang pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merenggut uang rakyat.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis mencoba untuk membahas lebih jauh mengenai pengelolaan penerimaan dengan pengeluaran pada kegiatan APBD. Maka dari itu penulis akan menuangkannya dalam laporan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kegiatan APBD pada Dinas Pertanian, Tanaman dan Pangan Provinsi Jawa Barat”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis membuat identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana laporan penerimaan dan pengeluaran kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada akhir periode tahun 2012-2013 di Dinas Pertanian, Tanaman dan Pangan Provinsi Jawa Barat?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan Provinsi Jawa Barat ?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi kendala yang ada dalam penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pertanian, Tanaman dan Pangan Provinsi Jawa Barat ?

1.3 Maksud dan Tujuan Studi

Maksud dari studi ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang kinerja dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kegiatan APBD yang telah berjalan mulai tahun 2012-2013 dengan melihat dan mempelajari buku kas umum kegiatan APBD yang terjadi pada Dinas Pertanian, Tanaman dan Pangan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas.

Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi di atas maka tujuan penulisan tugas akhir pada Dinas Pertanian, Tanaman dan Pangan Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Untuk mengetahui laporan penerimaan dan pengeluaran pada kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012-2013 di Dinas Pertanian, Tanaman, dan Pangan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui kendala- kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya menanggulangi kendala yang ada dalam penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pertanian, Tanaman dan Pangan Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Studi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Bagi penulis

Menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat digunakan sebagai bekal agar kelak dapat menerapkan kombinasi yang tepat antara teori dan keadaan yang sebenarnya dan meningkatkan kedewasaan dalam bersosialisasi/bermasyarakat khususnya dalam lingkungan kerja.

2. Bagi Instansi

Diharapkan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan laporan penerimaan dengan pengeluaran kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan laporan ini dapat berguna sebagai kajian pustaka bagi rekan-rekan mahasiswa program studi akuntansi dan menjadi informasi bagi yang ingin melakukan praktek kerja lapangan.

1.5 Metode Studi

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif karena metode tersebut dapat menggambarkan keadaan melalui kegiatan meneliti, mengumpulkan dan menyusun kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan dengan studi lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, dalam melakukan tugas akhir ini penulis memerlukan data dan keterangan-keterangan dari hasil praktik yang merupakan dasar dari pembuatan tugas ini. Data dan keterangan tersebut penulis peroleh dengan cara :

1. Wawancara

Melakukan Tanya jawab langsung dengan bagian-bagaian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam laporan ini.

2. Pengumpulan data-data terkait

Melakukan pengumpulan, membaca dan mempelajari dokumen-dokumen perusahaan sehubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kegiatan APB.

3. Observasi

Pengamatan langsung terhadap Dinas Pertanian, Tanaman dan Pangan Provinsi Jawa Barat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas guna memperoleh kenyataan yang sebenarnya dari masalah yang diteliti.

Adapun data yang dipergunakan adalah :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung oleh penulis, dengan melakukan observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, dan data yang diperoleh dari catatan dan laporan.

1.5 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Lapangan

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam laporan tugas akhir ini penulis melakukan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan mulai tanggal 3 Februari 2014 sampai dengan 21 Maret 2014 di Dinas Pertanian, Tanaman dan Pangan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Surapati 151 Bandung 40123.